



NUSANTARA

A decorative graphic consisting of numerous vertical white lines of varying heights, creating a wave-like pattern across the middle of the page. The lines are denser and taller on the left and right sides, and shorter and more closely spaced in the center.

IKNpedia

IKNpedia



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



s.id/iknpedia

DAFTAR ISI

A. Pemindahan Ibu Kota Negara

- Kapan Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah?
- Ibu Kota Negara Pindah Ke Mana?
- Bagaimana Ide Pemindahan Ibu Kota Bisa Terbentuk?
- Kenapa Ibu Kota Harus Pindah ke Tempat yang Baru?
- Bagaimana Kondisi Pulau Jawa Dibanding Wilayah Lainnya?
- Bagaimana Kondisi Jakarta Jika Tetap Sebagai Ibu Kota?
- Bagaimana Tahapan Menuju IKN?
- Siapakah yang Mengelola IKN?
- Seperti Apa Identitas Ibu Kota Nusantara?

B. Lokasi Ibu Kota Nusantara

- Kemana Ibu Kota Negara Pindah?
- Bagaimana Batas Wilayah IKN?
- Bagaimana Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota
- Mengapa Kalimantan Timur yang Dipilih?
- Bagaimana Potensi Wilayah di Sekitar IKN?

C. Bagian Wilayah Ibu Kota Nusantara

- Berapa Luas Wilayah IKN?
- Bagaimana Pembagian Wilayah di IKN?
- Bagaimana Pembagian Kawasan Inti Pusat Pemerintah/KIPP?
- Bagaimana Wilayah Administratif Wilayah IKN?
- Bagaimana Wilayah Perencanaan IKN?
- Bagaimana Rencana Konektivitas IKN?

D. Menuju Kota Cerdas Nusantara

- Bagaimana Konsep Ibu Kota Nusantara?
- Seperti Apakah Konsep Kota Cerdas Nusantara?

- Apa Itu Kota Cerdas Nusantara?
- Apa Saja Teknologi Utama Kota Cerdas Nusantara?
- Bagaimana Jaringan Telekomunikasi yang Akan Digunakan di IKN?
- Apa Saja Teknologi Pendukung Kota Cerdas?
- Transportasi Apa yang Akan Digunakan di IKN?
- Bagaimana IKN Akan Jadi Superhub Ekonomi Nasional?
- Apa Aplikasi untuk Lebih Mengetahui IKN?

E. Proses Pembangunan IKN

- Kapan Pembangunan IKN Selesai?
- Apakah Masyarakat Dapat Berpartisipasi Membangun IKN?
- Bagaimana dengan Keselamatan Kerja Selama Proses Pembangunan IKN?
- Bagaimana Konsep Pembangunan IKN? (Terkait Tata Kota, Pelestarian, Keberagaman, Budaya, Pengelolaan Hutan)?
- Bagaimana Perlindungan Lingkungan dalam Pembangunan Nusantara?
- Bagaimana Pengelolaan Hutan di IKN?
- Bagaimana IKN Pengelolaan Permasalahan Alam di Kalimantan Timur?
- Bagaimana dengan Masalah Pertanahan Dengan Masyarakat Umum, Masyarakat Adat, dan Kesultanan Terkait IKN?
- Bagaimana Status Penanganan Tanah Adat ke depannya?
- Apa Manfaat Pembebasan Lahan 30.000 Ha di Kawasan IKN Bagi Masyarakat?
- Apa Manfaat dari Lahan Kawasan Pengembangan IKN (199.962 Ha) Bagi Masyarakat yang Bermukim di Wilayah tersebut?
- Siapa yang Memiliki Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara?
- Bagaimana Aturan Tentang Hak Atas Tanah (Hat) dan Hak Guna Bangunan di Lingkungan IKN?
- Mengapa Investor Ibu Kota Nusantara Diberi Hak Guna Usaha dan Hak Pakai yang Panjang?

F. Pemerataan Ekonomi

- Apa Kaitan Pembangunan IKN Dengan Pemerataan Ekonomi?
- Apa Hubungan Pemerataan Ekonomi dan Tujuan Indonesia 2045?
- Apakah Pembangunan Ini Menghadirkan Lapangan Pekerjaan Baru?
- Bagaimana Pelaku Usaha dari Masyarakat Setempat Terlibat Dalam Pembangunan IKN?

G. Pemindahan ASN

- Mengapa ASN Dipindahkan ke IKN?
- Apa Manfaat Pemindahan ASN ke IKN?
- Berapa Jumlah ASN yang Akan Pindah?
- Berapa Jumlah ASN yang Pindah Tahap Pertama?
- Pada 2024, Instansi Apa Saja yang Diutamakan Pindah ke IKN?
- Bila Melihat Jumlah Unit Apakah ASN akan Pindah Secara Bersamaan Pada 2024?
- Apa yang Dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran ASN?
- Bagaimana Pemerintah Dapat Memastikan Transisi yang Lancar Bagi ASN yang Pindah ke IKN?
- Apa Saja Fasilitas/Benefit yang Akan Didapatkan Oleh ASN yang Pindah ke IKN?
- Apa Syarat yang Harus Dipenuhi ASN yang Akan Pindah ke IKN?
- Apakah ASN Dapat Menolak untuk Dipindahkan ke IKN?
- Apakah Para ASN, TNI, Polri yang Pindah ke IKN Mendapatkan Rumah?
- Apakah Hunian untuk ASN Sudah Siap?
- Bagaimana dengan Keluarga ASN?
- Apa Saja Aktivitas FAM-trip Ini?



Pemindahan Ibu Kota Negara

01. Kapan Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah?

Tanggal 18 Januari 2022.

Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU No.3/2022 oleh DPR RI dan Pemerintah.

Dengan demikian, Indonesia mempunyai Ibu Kota Negara yang baru, menggantikan Jakarta. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan bisa saja membawa pro dan kontra bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, seyogyanya seluruh komponen bangsa mendukungnya.

Pemindahan Ibu Kota Negara pun bukan tanpa alasan, namun ada banyak perhitungannya.



02. Ibu Kota Negara Pindah Ke Mana?

Dalam UU No.3/2022 tentang IKN, Ibu Kota Negara yang baru bernama Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur.

Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:



Menjadi kota berkelanjutan di dunia



Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan



Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

03. Bagaimana Ide Pemindahan Ibu Kota Bisa Terbentuk?

Pindahnya Ibu Kota tidak tiba-tiba, melainkan sudah dicanangkan dari para pemimpin Indonesia sebelumnya.



Presiden Ir. Soekarno

Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan tanggal 17 Juli 1957 oleh Ir. Soekarno yang memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan tempatnya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas.



Presiden Soeharto

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru (TEMPO Co).



Presiden Joko Widodo

Pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020–2024.

04. Kenapa Ibu Kota Harus Pindah ke Tempat yang Baru?

Melansir penjelasan Kementerian Keuangan, ada beberapa alasan, antara lain:

Menghadapi tantangan masa depan

Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045.



2045

PDB per kapita
sebesar US\$ 23.119

Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020–2024. Oleh sebab itu **dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.**

IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia

Selama ini, hanya Jakarta dan sekitarnya yang terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain).

Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen.

Jakarta

Data Sensus Penduduk 2020



Juasnya hanya 664,01 km²
atau 0.003% dari total luas daratan Indonesia
1.919.440 km²



Jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia
270,20 juta jiwa

Secara garis besar, perpindahan bertujuan agar bisa mengurangi kesenjangan antara pulau Jawa dan wilayah lainnya

Adanya pembangunan yang hanya tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa, menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Kondisi ini dinilai kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan *sustainable*, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia.

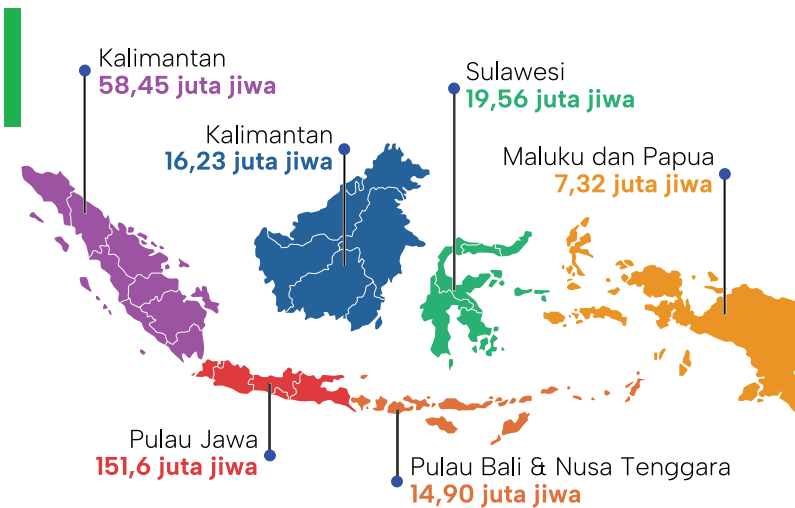
Kondisi objektif Jakarta dinilai kurang cocok lagi sebagai ibu kota

Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta seperti halnya permasalahan kualitas air, banjir, hingga gempa bumi.

05. Bagaimana Kondisi Pulau Jawa Dibanding Wilayah Lainnya?

Berdasarkan sebaran per pulau, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Dengan luas hanya sekitar 7 persen dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa ditempati oleh 151,6 juta jiwa atau 56,9% penduduk Indonesia.



06. Apa Pertimbangan Jakarta Tidak Dijadikan Ibu Kota Negara di Masa Mendatang?

Melansir Buku Saku Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Bappenas, wilayah Jakarta saat ini terancam berbagai masalah.



Banjir

Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan, sementara ideal kota besar itu minimumnya 50 tahunan.



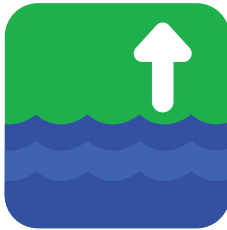
Air Tanah

Tanah turun di Jakarta mencapai 35–50 cm selama kurun waktu 2007–2017, dengan rata-rata penurunan muka air tanah 7,5–10 cm per tahun.



Kualitas Air

57% air waduk tercemar berat dan 61% air sungai juga tercemar berat.



Ketangguhan

Terjadi kenaikan muka air laut sebesar 25–50 cm pada tahun 2050.



Aktivitas Gunung

Jakarta juga terancam oleh aktivitas Gunung Api (Krakatau, G.Gede) dan potensi gempa bumi-tsunami Megathrust Selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda dan gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri. (Tri Nuke P., 26 Juli 2019, LIPI)

Juga ada juga persoalan lain



Kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km².



Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020. (TomTom Traffic Index)

07. Bagaimana Tahapan Menuju IKN?

Berdasarkan tata waktu IKN, periode pengembangan IKN dimulai tahun 2022 dan dalam periode perencanaan IKN jangka panjang, diproyeksikan sampai dengan tahun 2045.

2022-2024

Pemindahan tahap awal

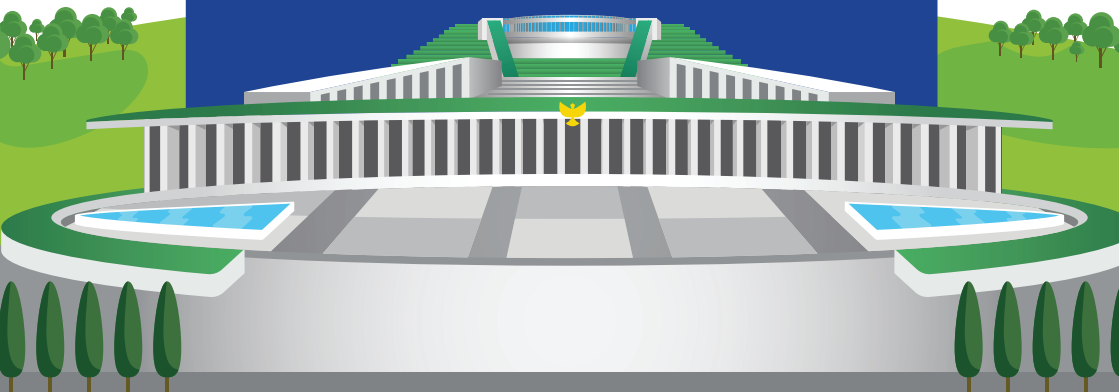
- ◆ Membangun infrastruktur utama (mis. Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR) dan perumahan di area Utama KIKN
- ◆ Pemindahan ASN tahap awal (mis. TNI, Polri, MPR)
- ◆ Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi (misalnya air, energi, rail)
- ◆ Presiden pindah ke KIKN sebelum 16 Agustus 2024 dan merayakan Peringatan Hari Kemerdekaan RI di KIKN pada tanggal 17 Agustus 2024
- ◆ Pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional dimulai

2025-2029

Membangun IKN sebagai Area Inti yang Tangguh

Infrastruktur utama ditargetkan sudah siap untuk dihubungkan ke kawasan baru yang dikembangkan setelah Tahap 1.

- ◆ Fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder ditargetkan siap untuk dipakai pada kawasan yang dihuni oleh penduduk IKN
- ◆ Peningkatan jumlah penduduk di dalam IKN meningkat dengan tajam
- ◆ Pembangunan universitas unggulan yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknologi
- ◆ Pembangunan Bandara WIP



2030-2034

Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif, seperti infrastruktur kawasan

- ◆ Pemindahan tahap awal
- ◆ Sistem angkutan umum massal di KIKN
- ◆ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- ◆ Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- ◆ Bendungan Batu Lepek telah beroperasi
- ◆ Pengolahan Sampah
- ◆ Penyediaan Listrik dan Energi
- ◆ Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di kawasan prioritas.



2035-2039**Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan**

- ◆ Perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan
- ◆ Perluasan kawasan perkotaan pada tahap ini telah mencapai IKN Utara, terutama pada kawasan yang terhubung langsung dengan IKN Timur.

2040-2045**Mengokohkan reputasi “sebagai Kota Dunia untuk Semua”**

- Pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.
- Populasi KIKN dicanangkan mencapai kurang lebih 1,7 s.d. 1,9 juta jiwa (kepadatan 100 jiwa per hektare)
- Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ditargetkan telah terbangun secara menyeluruh,
- Pembangunan dari segi inovasi dan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan produksi domestik, regional ataupun global, serta penurunan ekspor dan perluasan pangsa ekspor.

08. Siapakah yang Mengelola IKN?

Yang mengelola IKN adalah **Otorita IKN (OIKN)**.

Otorita IKN memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta menyelenggarakan Pemerintah Khusus IKN.

Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.



◆ **Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara**
Ir. Bambang Susantono, MCP, MSCE., Ph.D.



◆ **Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara**
Ir. Dhony Rahajoe



◆ **Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara**
Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya S.H.,
LLM

09. Seperti Apa Identitas Ibu Kota Nusantara?

Filosofi

17 kembang mekar

Melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia

Perisai Talawang

Simbol pertahanan, diinspirasi dari perisai Talawang asal Kalimantan

7 Batang

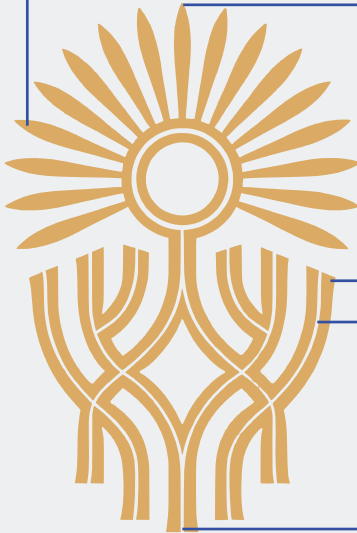
Representasi 7 pulau besar di Indonesia

Alur Sungai

Representasi bahari Indonesia dan simbol masyarakat maritim

5 Akar

Melambangkan 5 butir Pancasila, ideologi bangsa.



Pohon Hayat

Simbol kehidupan baru

B

Lokasi Ibu Kota Nusantara

01. Kemana Ibu Kota Negara Pindah?

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai **Ibu Kota Nusantara**, berada di Kalimantan Timur.

Secara garis besar, wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda.
Bagaimana Batas Wilayah IKN?

Batas Selatan

- ◆ Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
- ◆ Teluk Balikpapan
- ◆ Kecamatan Balikpapan Barat
- ◆ Kecamatan Balikpapan Utara
- ◆ Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

Batas Barat

- ◆ Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
- ◆ Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Batas Utara

- ◆ Kecamatan Loa Kulu
- ◆ Kecamatan Loa Janan
- ◆ Kecamatan SangaSanga Kabupaten Kutai Kartanegara

Batas Timur

- ◆ Selat Makassar

Batas Berdasarkan Garis Bujur/Lintang

- ◆ **Bagian Utara**
117° 0' 31.292" Bujur Timur
0° 38' 44.912" Lintang Selatan
- ◆ **Bagian Selatan**
117° 11' 51.903" Bujur Timur
1° 15' 25.260" Lintang Selatan
- ◆ **Bagian Barat**
116° 31' 37.728" Bujur Timur
0° 59' 22.510" Lintang Selatan
- ◆ **Bagian Timur**
117° 18' 28.084" Bujur Timur
1° 6' 42.398" Lintang Selatan.

02. Bagaimana Kriteria Pemilihan Ibu Kota Negara?

Melansir Buku Saku Pemilihan Ibu Kota Negara, beberapa kriteria terpilihnya Kalimantan Timur di antaranya:

- ◆ Tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN, untuk mengurangi biaya
- ◆ Lokasi, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia, merepresentasikan keadilan
- ◆ Potensi konflik sosial rendah, memiliki budaya terbuka terhadap pendatang
- ◆ Daya dukung tanah dan air baku
- ◆ Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan
- ◆ Minimal terhadap bencana alam
- ◆ Dekat dengan kota *existing* yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur

03. Mengapa Kalimantan Timur yang Dipilih?

Kalimantan Timur dipilih karena merupakan lokasi yang aman dan minim ancaman bencana, aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda

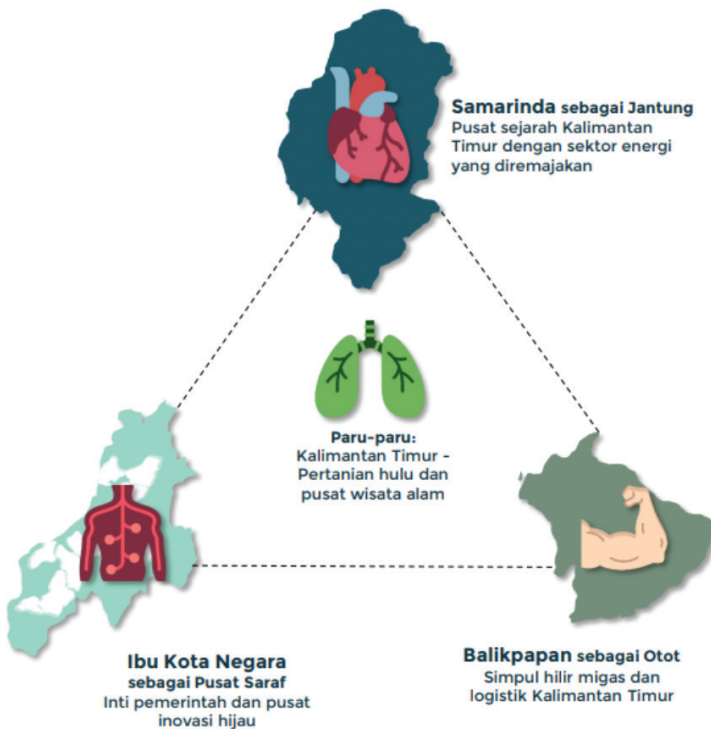
Infrastruktur Utama:

- ◆ Jalan tol Balikpapan Samarinda dan trans Kalimantan;
- ◆ Bandara di Balikpapan dan Samarinda;
- ◆ Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda
- ◆ Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai
- ◆ Berada di jalur ALKI II (Selat Makassar) Lahan luas, berstatus Hutan Produksi (HP) dan Perkebunan
- ◆ Kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan
- ◆ Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, Udara
- ◆ Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah

04. Bagaimana Potensi Wilayah di Sekitar IKN?

IKN berada di antara 2 kota yang sudah berkembang pesat, yaitu Samarinda dan Balikpapan.

Ibarat organ, ketiga kota ini akan saling berfungsi untuk kemajuan. Sehingga, kedepannya akan ada segitiga perkotaan di Kalimantan Timur.





Bagian
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

01. Berapa Luas Wilayah IKN?

Cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi daratan dan perairan.

Total area 322.429 ha (hektare)

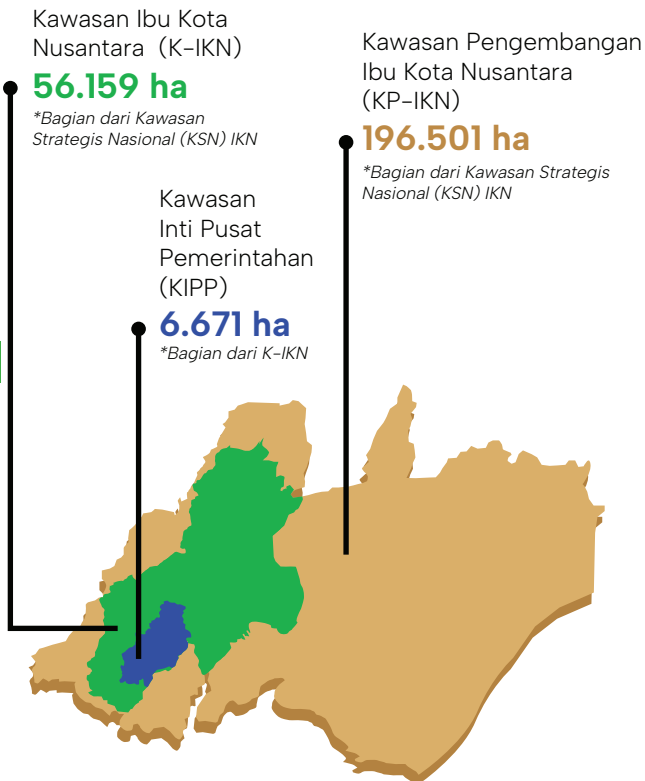
- ◆ Daratan **252.660 ha**
- ◆ Perairan laut **69.769 ha**

02. Bagaimana Pembagian Wilayah di IKN?

Perencanaan IKN terbagi atas beberapa wilayah perencanaan, yakni sebagai berikut:

Secara keseluruhan/
Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN

252.660 ha



03. Bagaimana Pembagian Kawasan Inti Pusat Pemerintah/KIPP?

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tidak hanya dikelilingi hutan kota melainkan juga dikelilingi jalur hijau beserta gedung-gedung pemerintahan.

Luas KIPP 6.671 ha

- ◆ Istana kepresidenan, seluas 100 hektare.
- ◆ Istana Wakil Presiden, seluas 14,58 hektare.
- ◆ Gedung wakil rakyat (DPR/MPR/DPD), seluas 41,81 hektare.
- ◆ Kompleks yudikatif MA/MK/KY, seluas 15,16 hektare.
- ◆ Gedung-gedung kementerian, masing-masing seluas 1-5 hektare.
- ◆ Terdiri dari berbagai zona mixed-use dan neighborhood yang mendukung konsep "10 menit berjalan kaki" dan konektivitas sosial.
- ◆ Didesain selaras dengan alam, dengan minimal 50% ruang hijau.
- ◆ 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan.

04. Bagaimana Wilayah Administratif Wilayah IKN?

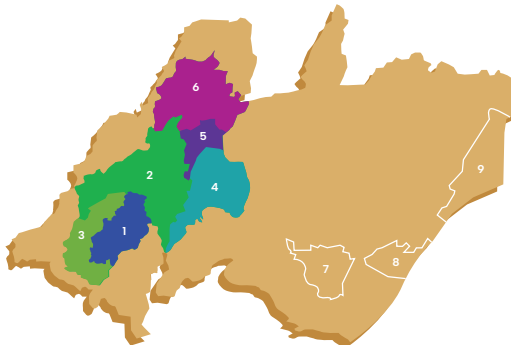
Wilayah IKN seluas kurang lebih 256.142 hektare, terdiri atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah IKN.

- ◆ 15 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku
- ◆ 21 desa/kelurahan di Kecamatan Samboja
- ◆ 5 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Janan
- ◆ 2 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Kulu
- ◆ 7 desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa
- ◆ 1 desa/kelurahan di Kecamatan Penajam

05. Bagaimana Pembagian Wilayah Perencanaan IKN?

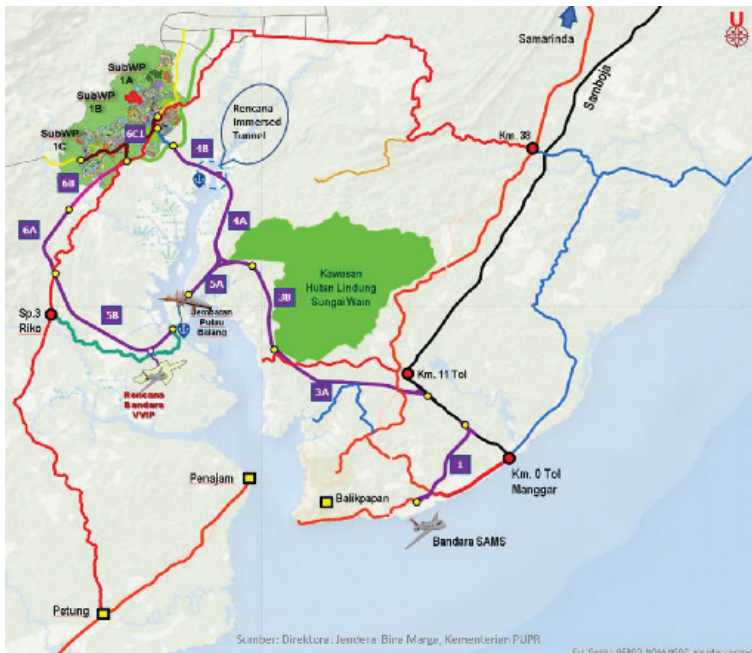
Wilayah perencanaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1 KIPP/Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (pemerintahan nasional dan smart government, perkantoran)
- 2 Pusat Ekonomi (IKN Barat)
- 3 Layanan Kesehatan (IKN Selatan)
- 4 Pariwisata dan Hiburan (IKN Timur 1)
- 5 Layanan Pendidikan (IKN Timur 2)
- 6 Inovasi dan Riset (IKN Utara)
- 7 Pusat Industri Pertanian dan Logistik (Simpang Samboja)
- 8 Pusat Sentra Pertanian (Muara Jawa)
- 9 Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi (Kuala Samboja)



05. Bagaimana Rencana Konektivitas IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini masih terus membangun konektivitas menuju kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan percepatan pembangunan jalan tol IKN.



Daftar Jalan

1	Jalan Tol Seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam
3A	Jalan tol IKN Seksi 3A: Segmen Karangjoang – KKT Kariangau
3B	Jalan Tol IKN Seksi 3B: Segmen KKT Kariangau – Sp. Tempadung
5A	Jalan Tol IKN Seksi 5A: Segmen Sp. Tempadung – Jembatan Pulau Balang
5B	Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B: Segmen Jembatan P. Balang – Riko
6A	Jalan Bebas Hambatan : Seksi 6A: Segmen Riko - Rencana Outer Ring Road IKN
6B	Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B: Rencana Outer Ring Road – Sp. 3 ITCI
6C1	Jalan Seksi 6C-1: Sp. 3 ITCI – Simpang 1B – Sumbu Kebangsaan Timur KIPP
4A	Jalan Tol Seksi 4a: Segmen Sp. Tempadung – Outer Ring Road IKN
4B	Immersed Tunnel IKN Sungai Sepaku

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR



Menuju Kota Cerdas Nusantara

01. Bagaimana Konsep Ibu Kota Nusantara?

Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Perpres 63/2022), dijelaskan bahwa prinsip dasar pengembangan kawasan ibu kota menggabungkan tiga konsep pembangunan perkotaan.

- ◆ Kota hutan,
- ◆ Kota spons,
- ◆ Kota cerdas.

Ibu Kota Nusantara

- ◆ Akan jadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan keunggulan kota Balikpapan dan Samarinda
- ◆ 75% kawasan IKN akan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau di mana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan
- ◆ IKN dikembangkan dengan 100% clean energy

02. Seperti Apakah Konsep Kota Cerdas Nusantara?

Ibu Kota Nusantara (IKN) bercita-cita menjadi **Kota Kelas Dunia untuk Semua**.



Selaras dengan Alam

- ◆ >75% dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)
- ◆ 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit
- ◆ 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian

Bhinneka Tunggal Ika

- ◆ 100% integrasi seluruh penduduk
- ◆ 100% warga dapat mengakses layanan sosial/ masyarakat dalam waktu 10 menit

- ◆ 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif

Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses

- ◆ 80% perjalanan dengan transportasi publik/mobilitas aktif
- ◆ 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik
- ◆ <50 menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030

Rendah Emisi Karbon

- ◆ Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN.
- ◆ 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung
- ◆ Net zero emission untuk IKN di 2045

Sirkular dan Tangguh

- ◆ >10% dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
- ◆ 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045
- ◆ 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035

Aman dan Terjangkau

- ◆ Ranking 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045
- ◆ Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045
- ◆ Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang

Nyaman dan Efisien melalui Teknologi

- ◆ Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh PBB
- ◆ 100% konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis
- ◆ >75% kepuasan dunia usaha atas layanan digital

Peluang Ekonomi untuk Semua

- ◆ 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035
- ◆ Pendapatan domestik regional bruto (PRDB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi
- ◆ Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada tahun 2045

03. Apa itu Kota Cerdas Nusantara?

Dalam konsep kota cerdas, Ibu Kota Nusantara dilengkapi dengan penerapan teknologi yang diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan. Komponen utama pembangunan kota cerdas diterapkan ke seluruh enam domain.

Smart Governance

Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, termasuk pengembangan sistem e-government dan peningkatan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Smart Transportation and Mobility

Peningkatan efisiensi dan kenyamanan transportasi melalui teknologi, termasuk pengembangan transportasi umum cerdas dan sistem manajemen lalu lintas cerdas.

Smart Living

Integrasi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, pengembangan rumah cerdas dan pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk manajemen energi dan keamanan masyarakat.

Smart Natural Resources and Energy

Optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan energi melalui teknologi, termasuk penerapan sistem manajemen sumber daya alam yang cerdas dan inisiatif efisiensi energi.

Smart Industry and Human Resources

Integrasi teknologi dalam industri dan pengembangan

sumber daya manusia, termasuk otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas.

Smart Built Environment and Infrastructure

Pengembangan infrastruktur cerdas dan berkelanjutan, termasuk pembangunan bangunan efisien energi dan ruang publik cerdas.

04. Apa Saja Teknologi Utama Kota Cerdas Nusantara?

Komponen utama teknologi kota cerdas adalah komponen-komponen yang menjadi tulang punggung atau fondasi bagi pembangunan kota cerdas.

Teknologi utama, meliputi:

Jaringan telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi merupakan sistem yang memungkinkan transfer data dan komunikasi antara lokasi yang berjarak jauh.

Data center

Merupakan pusat data merupakan infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan dan penyimpanan data yang mendukung berbagai layanan dan software (perangkat lunak) digital. Dalam konteks kota cerdas, pusat data bertanggung jawab menjadi pusat komputasi utama atas setiap layanan kota.

High performance computing

Merupakan teknologi komputer berspesifikasi tinggi untuk pengolahan data besar dengan sangat cepat, sering digunakan untuk penelitian dan analisis data yang kompleks.

Integrated command and control center

Merupakan sistem teknologi layanan perkotaan melalui integrasi dan pemantauan yang efisien. Sistem ini menggabungkan sistem video CCTV untuk pemantauan keamanan dan lalu lintas, mengkoordinasikan layanan

keawatdaruratan dan aduan masyarakat untuk respons cepat dalam situasi darurat, serta mengintegrasikan layanan sosial dan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Keamanan siber (cyber security)

Cyber Security merujuk pada serangkaian strategi, teknologi, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi infrastruktur, jaringan, dan data dari serangan siber.

Smart grid

Merupakan integrasi teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat lunak untuk pemantauan dan kendali sistem tenaga listrik mulai dari sistem pembangkitan dan transmisi tenaga listrik.

Dengan diterapkannya sistem smart grid, juga memungkinkan penagihan yang lebih akurat dan program respon permintaan listrik di IKN.

05. Bagaimana Jaringan Telekomunikasi yang Akan Digunakan di IKN?

Berdasarkan jenis, jaringan telekomunikasi yang beroperasi di lingkup wilayah IKN meliputi:

Jaringan Tetap (Fixed Network)

Merupakan infrastruktur telekomunikasi yang bersifat stabil dengan jalur tetap dan menggunakan koneksi kabel.

Jaringan Nirkabel (Wireless Network)

Merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio, mikro, atau cahaya inframerah untuk mengirimkan data tanpa menggunakan kabel.

Jaringan nirkabel di IKN akan dibagi berdasarkan izin kelas spektrum radio, meliputi:

- ◆ IMT Berbasis Izin Kelas
- ◆ Low Power-Wide Area Network(LP-WAN)
- ◆ Short Range Device (SRD)
- ◆ Private Mobile Radio (PMR)
- ◆ Radio Local Area Network (RLAN)

06. Apa Saja Teknologi Pendukung Kota Cerdas?

Komponen teknologi pendukung kota cerdas adalah komponen-komponen yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan teknologi kota cerdas. Komponen-komponen ini meliputi

Internet of Things (IoT)

Pemanfaatan teknologi IoT di IKN memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data dan informasi secara real-time dan optimal, berdampak pada pengolahan data yang lebih efisien di berbagai bidang.

Autonomous Driving

Merupakan teknologi pada kendaraan untuk beroperasi otomatis tanpa kontrol manusia. Teknologi ini terwujud berkat pengaplikasian sensor canggih dan artificial intelligence untuk pengalaman navigasi yang lebih aman dan nyaman.

Urban Air Vehicle

Merujuk pada penggunaan pesawat terbang yang dirancang khusus untuk lingkungan perkotaan, sering kali dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal.

Interactive Display

merupakan layar pintar yang memudahkan pengguna dalam menavigasi informasi, mengakses layanan, atau melakukan transaksi melalui antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif.

Smart Pole

Konsep tiang multifungsi yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan teknologi dalam sebuah fasilitas

07. Transportasi Apa yang Akan Digunakan di IKN?

Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Darat di Nusantara



Mobil Listrik



Bus Listrik



Kereta Listrik



Mobilitas Aktif



08. Bagaimana IKN Akan Jadi Superhub Ekonomi Nasional?

Jakarta Pindahan Ibu Kota Negara digadang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, IKN Nusantara diproyeksi menjadi superhub ekonomi nasional.

6 Kluster Ekonomi

- ◆ Kluster Industri Teknologi Bersih
- ◆ Kluster Farmasi Terintegrasi
- ◆ Kluster Industri Pertanian Berkelanjutan
- ◆ Kluster Ekowisata dan Wisata Kesehatan
- ◆ Kluster Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia
- ◆ Kluster Energi Rendah Karbon.

2 Kluster Pendukung

- ◆ Kluster Pendidikan Abad ke-21
- ◆ Smart City dan Pusat Industri 4.0

08. Adakah Aplikasi untuk Lebih Mengetahui IKN?

Kementerian PUPR dan Roblox telah merilis sebuah *game* edukatif bernama **“IKN Nusantara: Explore and Learn”**

Roblox, merupakan sebuah platform game online terkemuka yang memfasilitasi pengguna untuk menciptakan dan memainkan game buatan mereka sendiri.

Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan dan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Roblox adalah salah satu platform game online terbesar di dunia, dengan lebih dari 200 juta pengguna aktif setiap bulannya.

<https://www.roblox.com/games/10610309563/Nusantara>



E

**Proses
Pembangunan
Ibu Kota
Negara**

01. Kapan Pembangunan IKN Selesai?

Pemerintah optimis untuk dapat melaksanakan **Upacara 17 Agustus pertama** di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024 mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) juga menargetkan pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap I di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selesai pada 2024.

02. Apakah Masyarakat Dapat Berpartisipasi Membangun IKN?

Tentu saja boleh. Masyarakat dihimbau untuk aktif berpartisipasi melalui mekanisme ini, sehingga proses perubahan UU IKN dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama. Cara yang bisa dilakukan seperti:

Konsultasi Publik

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana mereka dapat mengajukan pertanyaan, masukan, dan kritik konstruktif.

Situs Web dan Media Sosial

Informasi dan saluran komunikasi telah disediakan melalui situs web resmi pemerintah dan media sosial untuk masyarakat menyampaikan pandangan mereka.

Rapat Terbuka

Forum diskusi dan rapat-rapat yang dibuka secara umum memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen terkait.

Survei Online

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam survei online yang diselenggarakan untuk mengumpulkan pendapat mereka.

Kontak Langsung

Masyarakat juga dapat menghubungi lembaga-lembaga terkait atau anggota parlemen secara langsung untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan mereka.

03. Bagaimana dengan Keselamatan Kerja Selama Proses Pembangunan IKN?

Otoritas IKN (OKIN) berkomitmen untuk memastikan keselamatan publik dan keselamatan kerja selama proses pembangunan.

Langkah-langkah ini penting sebagai upaya agar proyek pembangunan ibu kota baru berjalan dengan aman dan bertanggung jawab.

- ◆ Merencanakan keselamatan yang cermat, termasuk analisis risiko, pelatihan bagi pekerja, dan penerapan standar keselamatan yang tepat.
- ◆ Memastikan setiap pihak yang terlibat dalam proses pembangunan diwajibkan mematuhi standar keselamatan, menggunakan peralatan pelindung diri yang sesuai, dan mengikuti prosedur evakuasi darurat.
- ◆ Melakukan pengawasan dan inspeksi rutin untuk memantau pematuhan standar keselamatan selama pembangunan.

04. Bagaimana Konsep Pembangunan Ibu Kota Negara?

IKN ditegakkan dengan penuh kesadaran terhadap keseimbangan ekologi, mengikuti prinsip yang tertuang dalam **Pasal 3 Ayat (2) pada UU IKN**.

Prinsip-prinsip utama yang jadi landasan IKN:

- ◆ selaras dengan alam
- ◆ sirkuler
- ◆ tangguh
- ◆ rendah emisi karbon

Untuk mencapai tujuan ini, telah ditetapkan sejumlah target (KPI) hingga tahun 2045, seperti:

- ◆ alokasi minimum 65% wilayah IKN sebagai kawasan yang dilindungi
- ◆ 10% minimum wilayah IKN sebagai area produksi pangan
- ◆ penggunaan 100% energi terbarukan
- ◆ penghematan energi 60% dalam gedung
- ◆ pencapaian Net Zero Emission pada 2045
- ◆ daur ulang 60% timbunan sampah
 - pengolahan 100% air limbah

Berbagai langkah juga telah dilakukan Pemerintah untuk memastikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung

lingkungan, seperti penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) pada tahun 2019, perencanaan tata ruang, RDTR, Rencana Induk, dan AMDAL di IKN.

Dalam hal keberagaman dan budaya, IKN merancang pembangunan dengan memadukan budaya yang dapat diterima oleh semua masyarakat.

Strategi ini mencakup:

- ◆ penggunaan desain arsitektur tradisional
- ◆ penggunaan toponimi yang mencerminkan kearifan lokal dalam penamaan jalan, lokasi, bangunan, dan lainnya.

05. Bagaimana Perlindungan Lingkungan Dalam Pembangunan Nusantara?

Aspek perlindungan lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam pembangunan IKN.

Hal ini sejalan dengan tujuan menjadikan IKN sebagai kota hutan, kota spons dan kota cerdas.

Seperti halnya, pembangunan sektor pertanian.

Minimal 10% wilayah IKN

dialokasikan sebagai area produksi pangan yang diarahkan menjadi urban farming.

Pedoman penyelenggaraan pertanian perkotaan saat ini sedang disusun, yang akan diikuti dengan pelatihan dan pemberian bantuan kepada petani.

Seluruh kegiatan pertanian mengintegrasikan unsur teknologi, sehingga nantinya akan menjadi pertanian cerdas (smart farming) dan mampu mengendalikan emisi gas rumah kaca (climate-smart agriculture).

Jenis pertanian yang dijalankan:

- ◆ pertanian regeneratif
- ◆ permakultur
- ◆ integrated farming

06. Bagaimana Pengelolaan Hutan di IKN?

Wilayah IKN sebagian besar terletak di wilayah hutan, termasuk hutan produksi yang digunakan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan luas tutupan lahan hanya 42.3%.

Seperti konsep IKN yang menjadi kota hutan, maka:

65% wilayah

dialokasikan sebagai kawasan yang dilindungi yang akan dikembalikan menjadi ekosistem hutan tropis Kalimantan secara bertahap.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Otoriter IKN telah mengambil berbagai langkah konkret, seperti:

- ◆ rehabilitasi lahan yang kritis
- ◆ pengendalian deforestasi
- ◆ rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
- ◆ perlindungan koridor satwa di wilayah IKN
- ◆ pengembangan agroforestri di area yang telah digunakan oleh masyarakat

07. Bagaimana IKN Pengelolaan Permasalahan Alam di Kalimantan Timur?

Berdasarkan kebijakan tata ruang dan perincian rencana induk IKN, saat ini **tidak ada penerbitan izin tambang atau perpanjangan izin tambang di wilayah IKN.**

OIKN juga telah mengatur bahwa izin usaha pertambangan tidak akan diberikan di wilayah IKN dan mengawasi izin yang masih aktif untuk memastikan ketaatan pada kewajiban lingkungan, termasuk reklamasi dan pasca tambang.

OIKN telah membentuk Satgas untuk penertiban dan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal.

08. Bagaimana Dengan Masalah Pertanahan Dengan Masyarakat Umum, Masyarakat Adat, dan Kesultanan Terkait IKN?

Perubahan UU IKN terkait keberadaan tanah milik masyarakat dalam klasifikasi tanah di wilayah IKN **telah mendapat pengakuan, bersama-sama dengan tanah berupa Barang Milik Negara dan Barang Milik Otorita.**

Hal ini dijelaskan melalui perubahan UU 3/2022 yang sebagaimana dituangkan pada Pasal 15A ayat (3) UU Nomor 21/2023 menjelaskan bahwa, perlunya memperhatikan hak milik dan Hak Atas Tanah (HAT) dalam bentuk lain yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk hak adat.

09. Bagaimana Status Penanganan Tanah Adat ke depannya?

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dalam konteks pengakuan dan kepemilikan tanah ulayat/tanah adat **telah diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam perubahan UU IKN.**

Lebih lanjut, hal ini diperkuat dengan diberlakukannya PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang **memberikan kepastian hukum melalui pemberian Sertipikat HPL bagi pemegang hak.**

Saat ini, Pemerintah sedang melakukan penyusunan rancangan peraturan mengenai pendaftaran tanah adat (Perpres 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara).

Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengapresiasi upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam penyusunan peraturan mengenai pendaftaran tanah ulayat untuk memberikan kepastian hukum dan penguasaan tanah ulayat.

OIKN juga akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pergub Kalimantan Tengah nomor 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak – Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dalam penyusunan peraturan tersebut.

Terkait penyelenggaraan upacara adat, Pemerintah akan berkoordinasi dengan Pemda dan MHA setempat untuk mencari opsi terbaik.

10. Apa Manfaat Pembebasan Lahan 30.000 Ha di Kawasan IKN Bagi Masyarakat?

Hal terkait pembebasan lahan telah diatur dalam Perpres.

sekitar 30.000 hektar lahan

ditetapkan untuk tujuan konservasi hutan, dengan fokus pada restorasi area yang terdegradasi seperti bekas tebangan hutan tanaman, lahan bekas perambahan, dan bekas tambang, serta untuk pembangunan koridor satwa, baik yang bersifat alami maupun buatan.

- Perpres 63/2022

Kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan cara **memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemilik lahan.**

- Perpres 65/2022

Dengan demikian, terdapat potensi manfaat yang akan dirasakan masyarakat komunal dengan restorasi area-area tersebut.

Bentuk kompensasi yang diberikan dapat berupa, antara lain:

- ◆ Ganti kerugian untuk perolehan lahan melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

- ◆ Uang jual-beli untuk perolehan lahan melalui pengadaan tanah secara langsung dengan cara jual beli;
- ◆ Aset untuk perolehan lahan melalui pengadaan tanah secara langsung dengan cara ruislag; dan/atau
- ◆ Bentuk kompensasi lainnya untuk perolehan lahan melalui pengadaan tanah secara langsung dengan cara lainnya yang disepakati antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan pemilik lahan.
- ◆ Adapun ketentuan mengenai perolehan tanah sebagaimana dimaksud di atas diakomodir dalam perubahan UU IKN. *(Perpres 65/2022)*

11. Apa Manfaat dari Lahan Kawasan Pengembangan IKN (199.962 Ha) Bagi Masyarakat yang Bermukim Di Wilayah tersebut?

Menciptakan peluang ekonomi baru

Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan nasional, rencana struktur ruang di Ibu Kota Nusantara juga mencakup perkantoran, kawasan bisnis, dan komersial.

Mendorong transformasi hijau

Hal ini dilakukan dengan penanaman pepohonan dan penghijauan kawasan, menciptakan ruang terbuka yang nyaman untuk masyarakat dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Perencanaan yang baik untuk transportasi dan lingkungan juga berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik, mengurangi risiko masalah kesehatan dan penyakit pernapasan.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan

Fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, dan taman-taman umum juga menjadi bagian integral dari pengembangan ini.

Jika penggunaan lahan tidak sesuai dengan rencana tata

ruang, akan dilakukan penataan ulang untuk:

- ◆ industri 4.0
- ◆ wisata alam
- ◆ budaya ekowisata
- ◆ pusat inovasi
- ◆ pengembangan talenta
- ◆ wisata kesehatan
- ◆ pendidikan tinggi
- ◆ pertanian
- ◆ penelitian pangan
- ◆ pusat pelayanan publik

12. Siapa yang Memiliki Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara?

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi 4 berdasarkan pemiliknya.

Pada Pasal 15 A revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, tanah di IKN terdiri dari:

- ◆ barang milik negara,
- ◆ barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN),
- ◆ tanah milik masyarakat, dan
- ◆ tanah negara.

13. Bagaimana Aturan Tentang Hak Atas Tanah (HAT) dan Hak Guna Bangunan di Lingkungan IKN?

Jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT)
selama 80 dan 95 tahun

merupakan interpretasi dari Pasal 15 Perpres 65/2022, yang mengatur adanya jaminan perpanjangan, pembaruan, dan/atau perpanjangan dan pembaruan sekaligus Hak Atas Tanah (HAT) di atas Hak Pengelolaan (HPL).

Namun demikian, dalam Pasal 15 juga diatur bahwa pemberian jaminan tersebut hanya dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: diberikan paling cepat 5 tahun setelah Hak Atas Tanah (HAT) dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak.

Berdasarkan PP 18/2021, untuk HAT berupa Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan kepada **warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.**

14. Mengapa Investor Ibu Kota Nusantara Diberi Hak Guna Usaha Dan Hak Pakai yang Panjang?

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan hak pakai yang panjang bagi investor baik di dalam dan luar negeri untuk dapat memberikan rasa percaya, tanggung jawab dan keyakinan untuk berinvestasi.

Namun pemberian Hak Guna Usaha dan hak pakai yang panjang ini **sifatnya tidak mutlak alias bersyarat melalui proses tata kelola yang ketat oleh pemerintah.**

Berdasarkan Pasal 16A UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu peraturan menyebutkan **“dapat diberikan”** dan **“paling lama”** berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi sehingga setiap pihak yang terlibat dalam hal ini juga turut mempertanggungjawabkan kegiatannya.



Pemerataan Ekonomi

01. Apa Kaitan Pembangunan IKN dengan Pemerataan Ekonomi?

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan tonggak peradaban baru Indonesia, menjadi simbol identitas bangsa yang menunjukkan persatuan Indonesia, pemerataan ekonomi dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Tujuan Pembangunan IKN

- ◆ Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.
- ◆ Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia.
- ◆ Dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.
- ◆ Dapat menciptakan lapangan kerja baru di Kalimantan Timur, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
- ◆ Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah lain di Indonesia melalui peningkatan konektivitas.

02. Apa Hubungan Pemerataan Ekonomi dan Tujuan Indonesia 2045?

Tujuan besar dari pembangunan IKN perlu disiapkan dengan matang untuk dapat mencapai tujuan yang lebih besar juga.

IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Juga diharapkan dapat memperkuat kedaulatan negara, baik kedaulatan politik, ekonomi, maupun budaya.



Kedaulatan politik

Berarti kemampuan untuk menentukan arah pembangunan nasional



Kedaulatan ekonomi

berarti kemampuan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya



Kedaulatan budaya

berarti kemampuan untuk menjaga identitas budaya bangsa.

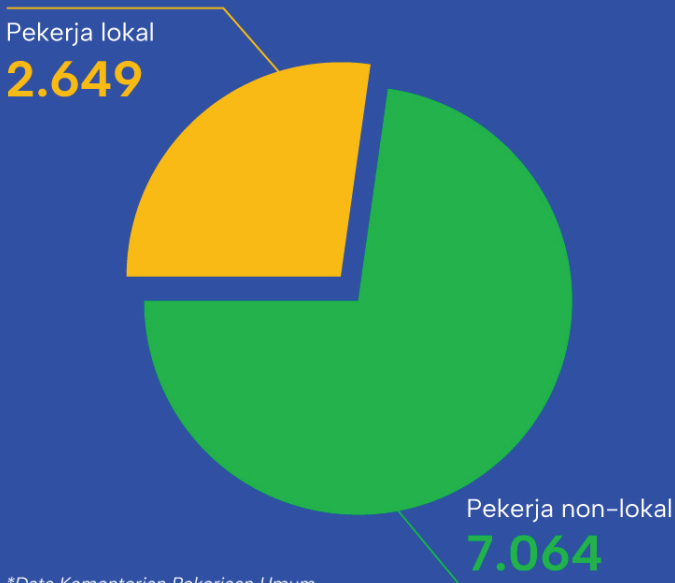
Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dan sejahtera.

03. Apakah pembangunan ini menghadirkan lapangan pekerjaan baru?

Tentu saja. Pembangunan IKN menghadirkan lapangan pekerjaan baru.

9.713 pekerja

bekerja dalam pembangunan IKN, berasal dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri.



**Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (per 3/8/2023)*

Perbedaan jumlah antara pekerja lokal dan non-lokal disebabkan oleh adanya kualifikasi khusus yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu di IKN.

Diversifikasi dan keragaman demografi pekerja mencerminkan perhatian pemerintah terhadap warga lokal.

Namun, perlu terus ditingkatkan persentase pekerja lokal sebagai fokus bersama.

Angka ini baru merupakan angka sementara yang bekerja dalam pembangunan. Ke depannya akan banyak lapangan pekerjaan dan potensi bisnis baru yang dapat menyerap tenaga kerja serta mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.



04. Bagaimana pelaku usaha dari masyarakat setempat terlibat dalam pembangunan IKN?

Berbagai upaya konkret telah dilakukan untuk melibatkan putra-putri terbaik Kalimantan Timur dalam proses pembangunan IKN.

Pemberdayaan dan Pelatihan

- ◆ Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk industri dan kewirausahaan, telah melibatkan lebih dari seribu orang.
- ◆ Pembinaan dan pendampingan sekitar 350 UMKM, termasuk sertifikasi produk halal dan pengurusan NIB.
- ◆ Pemberdayaan masyarakat akan difokuskan pada wirausaha, dengan perencanaan berbasis kebutuhan desa. "One village One Product" akan didorong oleh BLK Samarinda.
- ◆ Pertemuan dengan budayawan Kalimantan Timur, rembuk dengan masyarakat atau Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur
- ◆ FGD yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, dalam rencana menjadikan IKN dan wilayah mitra sebagai destinasi wisata
- ◆ Sosialisasi visi dan misi IKN kepada seluruh badan eksekutif mahasiswa



Pemindahan ASN

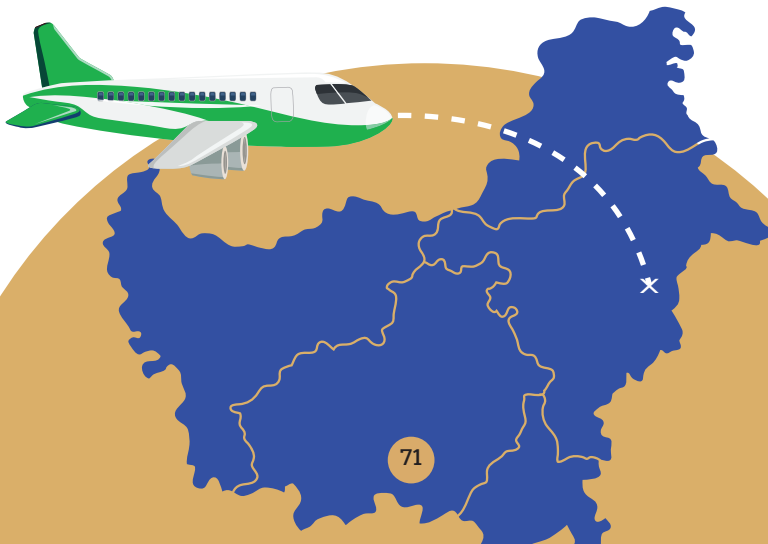
01. Mengapa ASN Dipindahkan ke IKN?

IKN merupakan tonggak peradaban baru Indonesia, menjadi simbol identitas bangsa yang menunjukkan persatuan Indonesia, pemerataan ekonomi dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, memiliki fondasi kuat untuk pertama kalinya dalam menjalankan proses tata kelola kenegaraan menjadi hal penting.

Oleh karena itu, **perpindahan ASN menjadi prioritas utama untuk membangun fondasi kuat dalam menjalankan proses tata kelola kenegaraan.**

Pemindahan ASN ke IKN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dan sejahtera.



02. Apa Manfaat Pemindahan ASN ke IKN?

Perpindahan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang berkelanjutan demi masa depan yang inklusif dan lestari, serta pemerataan ekonomi di Indonesia.

Ini juga akan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta dan meningkatkan kualitas hidup di ibu kota. Pemindahan ASN ke IKN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dan sejahtera.



03. Berapa Jumlah ASN yang Akan Pindah?

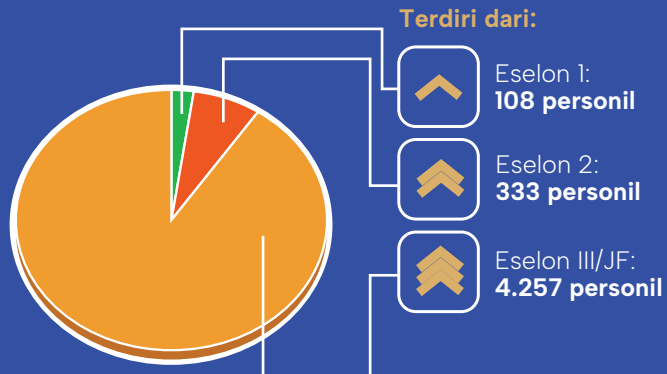
100.023 yang akan pindah dalam periode 2024–2045
personil

Sedangkan pada 2024 berdasarkan Perpres 63/2022 jumlah ASN, TNI dan Polri yang akan dipindahkan sebanyak 16.990 personil terdiri dari 11.274 adalah ASN dari 38 K/L dan 5.716 personil TNI/Polri.

04 Berapa jumlah ASN yang Pindah Tahap Pertama?

4.698
personil

Jumlah ASN yang pindah pada tahap pertama



05. Bila Melihat Jumlah Unit Apakah ASN Akan Pindah Secara Bersamaan Pada 2024?

Tentu saja bertahap.

Pemindahan ASN dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan hunian dan kantor.

Sesuai hasil rapat pemindahan ASN pada 4 Agustus 2023, ada **16 Kementerian/ Lembaga** (K/L) prioritas dengan pertimbangan fungsi.

- ◆ Kementerian Koordinator
- ◆ Kementerian Triumvirat
- ◆ K/L yang mendukung Presiden
- ◆ K/L Perencanaan dan Penganggaran
- ◆ K/L yang melaksanakan penyiapan infrastruktur dasar di IKN

Seperti misalnya **Istana Negara**, akan jadi salah satu kantor pemerintahan yang pertama kali pindah ke IKN.

Selain itu, ada empat Kementerian lainnya akan pindah ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

- ◆ Kementerian Dalam Negeri
- ◆ Kementerian Luar Negeri
- ◆ Kementerian Pertahanan
- ◆ Kementerian Sekretariat Negara

06. Apa yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Kekhawatiran ASN?

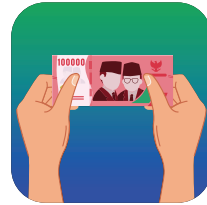
Pemerintah memberikan berbagai insentif kepada ASN yang bersedia pindah ke IKN, seperti:



Subsidi perumahan



Kenaikan gaji



Keringanan pajak

Pemerintah juga sedang mengembangkan infrastruktur dan fasilitas di IKN untuk memastikan kualitas hidup bagi ASN dan keluarga mereka.



07. Bagaimana Pemerintah Dapat Memastikan Transisi yang Lancar Bagi ASN yang Pindah ke IKN?

Saat ini, Pemerintah secara aktif memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas dan komprehensif kepada ASN tentang proses pemindahan.

Pemerintah juga memberikan dukungan yang memadai bagi ASN dan keluarga mereka, seperti bantuan dalam mencari perumahan dan sekolah.



09. Apa Saja Fasilitas/Benefit yang Akan Didapatkan Oleh ASN yang Pindah ke IKN?

Sebagai elemen bangsa yang memainkan peranan penting untuk dapat menjalankan tata kelola negara, Pemerintah memberikan fasilitas lengkap untuk menunjang ASN di IKN.

ASN yang akan pindah ke IKN akan memperoleh berbagai fasilitas meliputi;



Fasilitas rumah dinas di KIPP



Biaya pindah



Pemberian tunjangan kemahalan



Pemberian fasilitas yang fleksibel

Saat ini Kementerian PAN RB sedang menyusun konsep pemberian benefit untuk ASN yang akan menjadi penduduk pioneer di IKN yang lebih menarik.

10. Apa Syarat yang Harus Dipenuhi ASN yang Akan Pindah ke IKN?

Berdasarkan materi pemaparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), langkah untuk memindahkan PNS ke Nusantara yaitu penilaian kriteria PNS dilakukan oleh unit kepegawaian masing-masing kementerian atau lembaga dengan kriteria;



Jenjang pendidikan minimal D3.



Memperhatikan batasan usia pensiun.



Data kinerja ASN.D



ata kompetensi dan potensi ASN.

11. Apakah ASN Dapat Menolak untuk Dipindahkan ke IKN?

Secara hukum, **ASN tidak bisa menolak pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).**

ASN wajib ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Namun, ada beberapa pengecualian bagi ASN yang bisa menolak pindah ke IKN, yaitu:



ASN yang memiliki keterbatasan fisik atau kesehatan yang tidak memungkinkan untuk pindah.



ASN yang memiliki keluarga yang tidak dapat ikut pindah.



ASN yang sudah berusia 56 tahun atau lebih.

Selain itu, ASN juga bisa mengajukan permohonan **penundaan pindah ke IKN selama 1 tahun.**

Permohonan ini pun, harus diajukan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika ASN menolak pindah ke IKN tanpa alasan yang jelas, maka **dapat dikenakan sanksi disiplin** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Apakah Para ASN, TNI, Polri yang Pindah ke IKN Mendapatkan Rumah?

ASN yang akan pindah ke IKN akan memperoleh berbagai fasilitas rumah yang sesuai menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 akan mendapatkan rumah dinas dengan luasan tertentu.

Rumah susun

untuk Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional dan Pelaksana (11.619 unit).

Rumah tapak

untuk Menteri/Pejabat Tinggi Negara, Pejabat Negara dan Pejabat Tinggi Madya (327 unit).



13. Apakah Hunian untuk ASN Sudah Siap?

Saat ini **sedang proses pembangunan.**



Ketersediaan hunian 2024:

dibangun dengan skema pendanaan APBN sebanyak 31 menara dengan jumlah unit 1.860 unit.



Ketersediaan hunian 2025:

dibangun lewat skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebanyak 132 menara.

14. Bagaimana dengan Keluarga ASN?

Selain insentif, infrastruktur, dan fasilitas, Pemerintah juga memahami faktor lain seperti keluarga ASN.

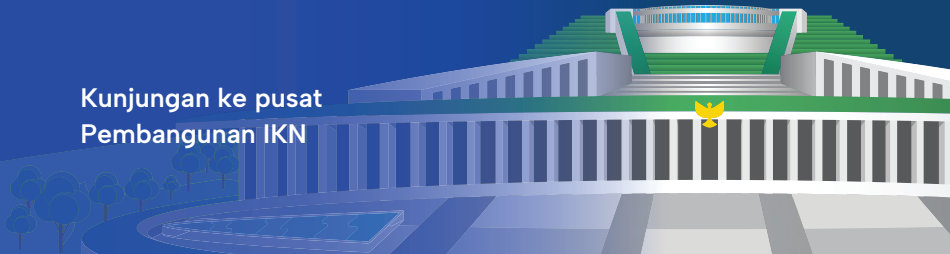
Pemerintah telah menyiapkan program FAM-trip atau family trip untuk memberikan pengalaman in-site secara langsung untuk menunjukkan janji dan nilai Nusantara.



15. Apa Saja Aktivitas FAM-trip Ini?

Keluarga yang diundang akan mendapatkan **pengalaman "tinggal"** di Nusantara mulai dari kedatangan mereka di bandara hingga beberapa aktivitas yang berhubungan dengan alam dan kebudayaan di Kalimantan Selatan.

Kunjungan ke pusat
Pembangunan IKN



Mengunjungi lokasi konstruksi
seperti Istana Presiden,
Gedung Kementerian dan
Titik Nol (kunjungan, walking
trip, mountain biking)



Sharing sejarah dan
potensi Nusantara



Partisipasi
Pengembangan IKN
melalui 3D Printing



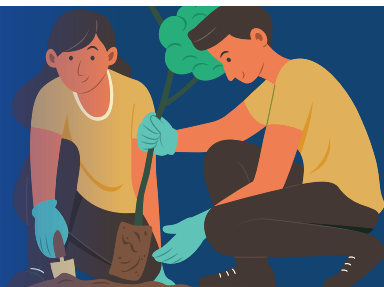
Kunjungan ke rumah
tradisional dan bersosialisasi
dengan penduduk lokal



Kunjungan ke BOSF untuk
melihat habitat asli
Orangutan dan Beruang Madu



Penanaman pohon



disusun dan dikurasi oleh:



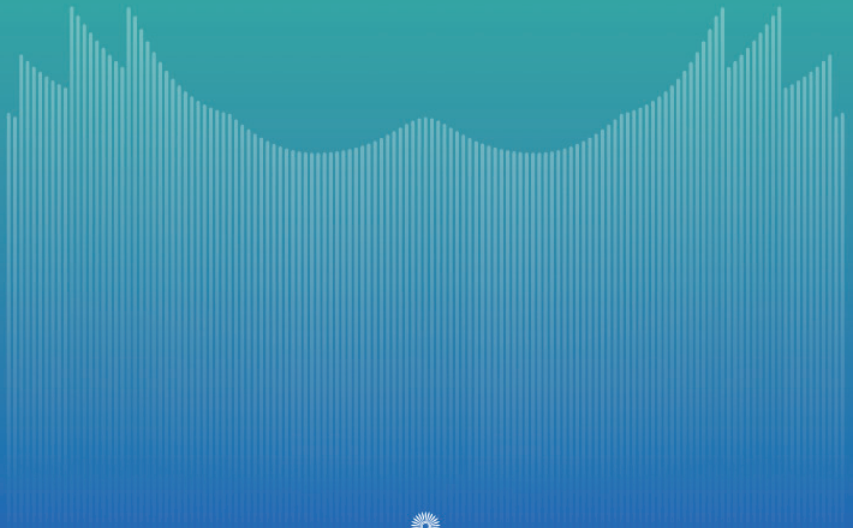
Informasi lebih lanjut

s.id/iknpedia

Kontribusi informasi, data, saran, kritik, dan masukan

email kami di indonesiabaik@kominfo.go.id

v.2024.02.05-001



NUSANTARA

IKNpedia